



2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK**

**JL. SUTOYO, KOMP SUTOYO INDAH
TELP/FAX : 0561-732806
PONTIANAK - 78121**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami proses perubahan di semua sektor kehidupan akibat Pandemi Covid 19, yang mana berimbas pada alokasi dana dari Jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Recofusing anggaran di amanah kan untuk mengantisi dampak pandemi covid 19. Banyak hal yang berubah dari kebiasaan lama menjadi tatanan kehidupan baru. Recofusing anggaran ini jelas berpengaruh terhadap kinerja OPD tidak terlepas Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, dimana seluruh kegiatan mengalami perubahan yang cukup besar

Alhasil Dokumen LAKIP pada tahun 2020 ini hanya menyajikan hasil pengukuran kinerja yang sangat kecil dibandingkan tahun tahun sebelumnya, namun dokumen Lakip ini tetap menyajikan laporan serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi dasar saja tergadap kinerja Kantor Kesbangpol Kota Pontianak serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good



Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pontianak.

LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Walikota Pontianak
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.

Demikian, semoga dokumen LAKIP Kantor Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Pontianak, Januari 2021

Kepala,

Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial
Politik Kota Pontianak

Rizal. S.Sos

Pembina Tk.I (IV b)

Nip. 19691005 199010 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2020 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2020 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen penuh Kantor Kesbangpol untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah dalam hal ini Kantor Kesbangpol yaitu :

1. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat

Dalam kaitan tersebut Kantor Kesbangpol telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (Dua) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Kantor Kesbangpol Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% target
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	75%
2	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	100%

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pendidikan Politik Masyarakat, program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pelayanan administrasi Perkantoran. Dalam merealisasikan sasaran tersebut Kantor Kesbangpol telah menggunakan dana sebesar Rp. 2.714.944.445,00 atau 96,82 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.804.150.926,00 yang bersumber dari DPA Perubahan .



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>) Yang Sedang Dihadapi Organisasi.....	9
E. Sistematika Penyusunan LAKIP 2019.....	9
Bab 2 Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis Organisasi.....	11
B. Perjanjian Kerja Tahun 2020.....	12
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	19
B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	19
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau D. Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	21
E. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	22
F. Capaian Target Renstra.....	25
G. Rencana Aksi Tahun 2020.....	26
Bab IV Penutup.....	34
A. Kesimpulan Umum.....	34
B. Saran.....	34
Lampiran Rencana Straregis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Tahun 2019-2023.....	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	12
Tabel 2.....	13
Tabel 3.....	14
Tabel 4.....	15
Tabel 5.....	16
Tabel 6.....	17
Tabel 7.....	17
Tabel 8.....	22
Tabel 9.....	25
Tabel 10.....	25
Tabel 11.....	25
Tabel 12.....	26
Tabel 13.....	31





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dokumen LKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LKIP 2020 dan Perjanjian Kinerja 2021.

LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kantor Kesbangpol) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Meskipun pada Tahun 2020 ini mengalami penurunan dari sisi anggaran akibat Pandemi covid 19 yang mewajibkan adanya refofusing anggaran untuk mendukung penanggulangan wabah covid 19, sehingga beberapa program dan kegiatan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun Dokumen LKIP ini tetap harus di tampilkan dan di laporkan untuk dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol pada tahun berikutnya.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2020 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kota Pontianak
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan OPD di Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik, Kantor merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Kantor serta mengordinasikan kegiatan.

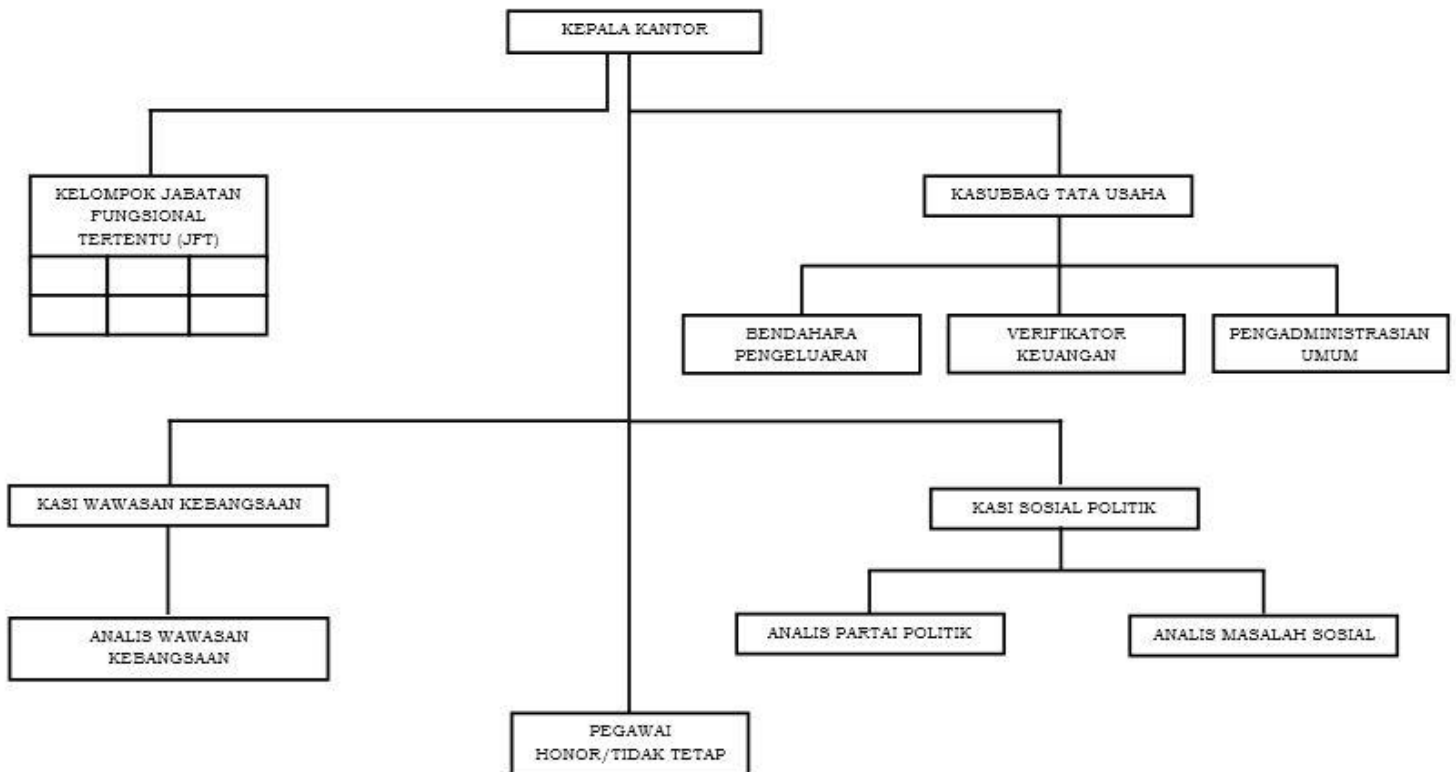
Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha, dan 2 (Dua) orang Kepala seksi sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



GAMBAR 1.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK
Dasar: Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2011 dan Nomor 08 Tahun 2012



1. Kepala Kantor mempunyai tugas:

- Menyusun kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- Mengendalikan kegiatan-kegiatan pada kantor mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- Melakukan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- f. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- g. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Kantor kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- h. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kesatuan bangsa dan sosial politik;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan sosial politik baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor yang diberikan oleh Walikota.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja di bidang ketatausahaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar penentuan sasaran dan program kerja tahunan kantor yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada para staf sesuai dengan tugas pokok, fungsi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;



- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para staf dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- g. Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang meliputi keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga (keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi) surat menyurat, pengusulan pembuatan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi Kesehatan (ASKES), Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), SATYA LENCANA, ijin cuti, kesejahteraan pegawai, usulan formasi dan mutasi pegawai, pensiun PNS, penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis .
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (RDPA), verifikasi keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ketatausahaan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaporkan kegiatan di bidang ketatausahaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Kantor;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ketatausahaan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Kantor.

3. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan bidang seksi kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kantor yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada para staf secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada para staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah dibuat untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ideologi negara , kewaspadaan dini, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, kerjasama intelijen keamanan, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa yang diberikan oleh Kepala Kantor.

4. Kepala Seksi Sosial Politik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan bidang sosial politik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kantor yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada para staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah dibuat untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang sosial politik berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang sosial politik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan seni budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, sistem dan implementasi kelembagaan politik, fasilitasi Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang sosial politik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan di bidang sosial politik sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sosial politik baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik yang diberikan oleh Kepala Kantor.

D. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Kantor Kesbangpol penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2020 tidak dapat berjalan dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya akibat refofusing anggaran. Namun aspek pembinaan, monitoring dan kegiatan rutin tetap dilaksanakan. Dimensi beberapa faktor /permasalahan yang menjadi isu sentral antara lain :

1. Kondisi objektif alamiah bangsa dan wilayah Indonesia yang sarat dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata;
2. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik, sebagai akibat kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.
3. Munculnya kembali semangat primordialisme serta lunturnya tekad dan lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme.
4. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada sebagian besar pemimpin bangsa, termasuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
5. Munculnya wabah virus corona 19 pada tahun 2020 yang mempengaruhi aspek anggaran dan berpengaruh pada kegiatan di kantor kesbangpol.

E. Sistematika Penyusunan LAKIP 2020

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, uraian singkat masing-masing sub adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, Struktur Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Kesbangpol Tahun 2020 meliputi Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Kesbangpol dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2020.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan dan kaidah perencanaan pembangunan daerah, bahwa VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam proses politik, kewajiban untuk menunaikannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai mesin birokrasi dalam mewujudkan program- program dan situasi yang berkembang dan mewujudkan implementasi perencanaan visi dan misi.

1. PERNYATAAN VISI

Visi Kota Pontianak tersebut yang merupakan gambaran dari masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan oleh Kota Pontianak dalam kurun waktu 2019 – 2023:

Pontianak kota Khatulistiwa Berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

2. PERNYATAAN MISI

Misi dari Kota Pontianak yang merupakan implementasi dari visi Kepala Daerah untuk mencapainya di formulasikan kedalam 5 misi dan yang menjadi tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak mengacu kepada misi yang 5 sebagai berikut :

5 Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

3. TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Kantor Kesbangpol untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1 Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak telah mengalami review pada tahun 2020, dan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 mempunyai sasaran strategis :

Tabel 1
Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2020 -2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %
2	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik	100 %

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 dengan mengambil target tahun 2020.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Tahun 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Berikut Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2020 :

1. Terciptanya kondisi Kondusif di Kota Pontianak
2. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat



Tabel 2
Matriks Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %
2	Meningkatnya toleransi di Kalangan Masyarakat	Persentase potensi Konflik agar tidak terjadi konflik	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Kesbangpol Tahun 2020.

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.804.150.926,00.- yang selengkapanya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 (terlampir).





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator kinerja sehingga dapat difindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik pada Tahun 2020 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %	80.09%	117.8%
2.	Meningkatnya toleransi di Kalangan Masyarakat	Persentase Potensi Konflik agar tidak terjadi Konflik	100%	100%	100%

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1

Terciptanya kondisi Kondusif di Kota Pontianak

Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %	80.09%	

Untuk mencapai Sasaran terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak, Kantor Kesbangpol mentargetkan Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebesar 75 %. Untuk Tahun 2020 meskipun Pemilu dan Pilkada sudah selesai pada tahun 2018 dan 2019 namun kegiatan ini berkaitan dengan aspek pembinaan politiknya.

Beberapa Kegiatan tidak bisa di laksanakan akibat pemangkasan anggaran untuk sehingga yang telah dilaksanakan Kantor Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Bimbingan teknis pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol;
2. Fasilitasi Tim verifikasi peneliti pemeriksa bantuan kepada parpol;
3. Pembinaan/sosialisasi ormas.
4. Fasilitasi Forkompimda
5. Fasilitasi Pendaftaran, pendataan dan pengelolaan siormas
6. Sosialisasi bahaya narkoba dan P4GN
7. Pelatihan pemetaan kapasitas satgas dan relawan anti narkoba
8. Fasilitasi Kerukunan umat beragama.

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui tapi

juga dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik, serta untuk membangun etika dan moral politik dengan sikap dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.

SASARAN 2

Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik	100%	100 %	100%

Untuk mencapai Sasaran Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat, Kantor Kesbangpol menargetkan Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik sebesar 100%.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Fasililiaasi FKDM
2. Fasilitasi FPK
3. Fasilitasi Kominda
4. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan belanegara;
5. Pelatihan bela negara

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau N-1 dan rencana tahun yang akan datang N+1 dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 6
Perbandingan Realisasi Tahun N dengan Tahun N-1 dan Rencana N+1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		% (Naik/ Turun)	Rencana Tahun N+1 (2021)
			Tahun N (2020)	Tahun N- 1 (2019)		
1.	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	%	78.69%	11.02%	69%
2.	Meningkatnya Toleransi di kalangan masyarakat	Persentase potensi konflik nagar tidak terjadi konflik	100%	99%	1%	69%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan belanja langsung yang telah ditetapkan terdiri dari **6** Program dan **14** Kegiatan dengan pagu anggaran APBD murni Tahun 2020 sebesar Rp. 3.078.891.417.- dan pagu anggaran perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.804.150.926 .- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Tahun 2020

Tujuan	Sasaran Strategis			Program		Kegiatan		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2020	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator Kegiatan	Pagu Rp.
Meningkatnya toleransi di Kalangan masyarakat	Meningkatnya keharmonisan dan kesadaran dalam keberagaman masyarakat	Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik	100 %	Pengembangan Wawasan kebangsaan	Angka konflik	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0
						Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0
						Fasilitasi Kominda		130,875,000
						Pembinaan Wawasan		0



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak
Tahun 2020

						dan belanegara		
						Pelatihan Belanegara		165.325.000
Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontiana	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %	Pembinaan dan pendidikan politik masyarakat	Jumlah	Bimbingan teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik		0
						Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Kepada Partai Politik		0
						Pembinaan/ Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan		0
						Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda		463,800,000
						Fasilitasi Pendaftaran, Pendataan dan pengelollan sistim informasi Pengawasan Ormas		0
						Sosialisasi Bahaya Narkoba dan penyebarluasan informasi tentang P4GN		0
						Pelatihan, Pemetaan dan Penguatan kapasitas satgas dan relawan anti narkoba	Terlaksana	25,500,000
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan di OPD sesuai Ketentuan	100%	Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	Tingkat Laporan Keuangan pada Kantor Kesbang pol Sesuai	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah Dokumen yang tersusun	37,290,000
						Total Jumlah Anggaran		1.241.075.400

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hasil akuntabilitas pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak pada tahun 2020, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari dua indikator yang di tetapkan pada tahun 2020, sebanyak 2 indikator kinerja belum dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, secara umum target pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020 belum dapat dicapai dengan baik.

Secara ringkas, belum tercapainya sasaran strategis tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak", dengan indikator sasaran Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih belum menunjukkan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian %.
2. Sasaran strategis "Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat", dengan indikator sasaran Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%. Hal ini dapat terlihat meskipun tidak tersedia dana penunjang namun tidak terjadi konflik di tahun 2020, dimana banyak terjadi unjuk rasa berkaitan dengan draf rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Munculnya wabah covid 19 yang menimbulkan aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat, di syahkan nya UU Cipta Kerja, Pernyataan Mantan Kepala BIN terhadap Sultan Hamid II dan yang terakhir berkaitan dengan kepulauan Habib Muhammad Riziq Shihab dengan tewasnya 6 pengawal FPI.

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Kantor Kesbangpol Kota Pontianak pada tahun 2020 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran belum terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia



(SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dapat dilaksanakan.

RINCIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK

1. Realisasi Anggaran Kesekretariatan (Program Umum)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.987.700.926,00	1.901.765.745	95,68
	Gaji dan Tunjangan PNS	1.563.075.526,00	1.491.546,452	95,42
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	32.700.000,00	18.833.207	57,59
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	16.997.000,	99,98
1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	17.000.000,00	16.953.800	99,72
1.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.289.000	91,56
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3.500.000	3.480.000	99,43
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000	13.982.500	99,88
1.7	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi	101.344.800	101.244.850	99,90
1.8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128.336.000	128.336.000	100
1.9	Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor	.83.244.600	83.179.200	99,92
1.10	Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah			99,70
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	28.900.000	28.775.000	99,57
2.1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung	24.000.000	24.000.000	100
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.600.000	4.435.000	97,28
1	2	3	4	5
3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	0	0	0
4.1	Penyusunan Rencana Kerja	0	0	0
4.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
5	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja	12.700.000	12.700.000	100
5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12.700.000	12.700.000	100
6	Program Peningkatan Pelayanan Prima	0	0	0



6.1	Penyusunan Laporan IKM	0	0	0
	JUMLAH	507.355.400	451.694.294	89,03

Sumber : Kesbangpol Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020

1. Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	296.200.000	293.774.600	99,00
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	0	0	0
1.2	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	0
1.3	Fasilitas Kominda	130.875.000	130.700.000	99,87
1.4	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0	0	0
1.5	Pelatihan Bela Negara	165.325.000	163.074.600	98,64
2	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	412.540.000	410.740.850	99,56
2.1	Fasilitasi Tim Verifikasi Penelitian Pemeriksaan Bantuan Kepada Partai Politik	14.850.000	14.850.000	100
2.2	Fasilitasi Pendaftaran, pendataan dan pengelolaan sistim informaswi pengawasan ormas	0	0	0
2.3	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	0	0	0
2.4	Fasilitasi Forkopimda	463.800.000	463.079.100	99,84
2.5	Pembinaan/sosialisasi Ormas	0	0	0
2.6	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat beragama	0	0	0
2.7	Sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang P4GN	0	0	0
2.8	Pelatihan, pemetaan dan penguatan kapasitas satgas dan relawan anti narkoba	0	0	0
	JUMLAH	478.650.000	477.929.100	99,00

Sumber : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak tahun Anggaran 2020

D. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesbangpol Kota Pontianak pada tahun 2020 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran belum terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada belum dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesbangpol Kota Pontianak pada tahun 2020.



E. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pagu anggaran Kantor Kesbangpol Kota Pontianak pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.804.150.926,00 yang terdiri dari Belanja gaji sebesar Rp. 1.565.075.526 dan Belanja kegiatan sebesar Rp. 1.241.075.400 bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran belanja gaji adalah sebesar Rp. 1.491.546.452,00 atau sebesar 95,42 %. Sedangkan penyerapan anggaran belanja kegiatan adalah sebesar Rp. 1.223.397.993 atau 98,57%, sehingga total penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.714.944.445, 00 atau 96,82 %. Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020
Kantor Kesbangpol Kota Pontianak

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,700,000	18,883,207	57,59
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,000,000	16,997,000	99,98
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,000,000	16,953,100	99,72
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,289,000	91,56
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,500,000	3,480,000	99,43
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	14,000,000	13,982,000	99,88
7	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	101,344,800	101,244,850	99,90
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128,336,000	128,336,000	100,00
9	Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor	83,224,600	83,179,200	99,92
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	25,000,000	24,924,436	99,70



11	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	0,00	0,00	0,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	300,000	300,000	100,00
13	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	24,000,000	24,000,000	100,00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor	4,600,000	4,475,000	97,28
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
16	Penyusunan Rencana Kerja	0,00	0,00	0,00
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	0,00	0,00	0,00
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12,700,000	12,700,000	100,00
19	Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0,00	0,00	0,00
20	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	0,00	0,00	0,00
21	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0,00	0,00	0,00
22	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	0,00	0,00	0,00
23	Fasilitasi Kominda	130,875,000	130,700,000	99,87
24	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	0,00	0,00	0,00
25	Pelatihan Bela Negara	165,325,000	163,074,000	98,64
26	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00
27	Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Kepada Partai Politik	14,850,000	14,850,000	100,00



28	Pembinaan/Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
29	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan	463,800,000	463,079,100	99,84
30	Fasilitasi Pendaftaran, Pendataan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)	0,00	0,00	0,00
31	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyebarluasan Informasi Tentang P4GN Kepada Aparatur Pemerintah Kota Pontianak	0,00	0,00	0,00
32	Pelatihan, Pemetaan dan Penguatan Kapasitas Satgas dan Relawan Anti Narkoba pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		2,804,150,926	2,714,944,445	96,82





Tabel 9
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Gaji Tahun 2020
Kantor Kesbangpol Kota Pontianak

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Gaji	696,825,454	677,230,128	97,19
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	866,250,074	814,316,324	94,00

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019
Kantor Kesbangpol Kota Pontianak

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		ANGGARAN	ANGGARAN 2019		ANGGARAN	ANGGARAN 2020	
		2019	Rp	%	2020	Rp	%
1	BELANJA GAJI	1.149.223.000	841.551351	73,23	1,563,075,526	1,491,546,452	95,42
2	BELANJA KEGIATAN	1.804.095.784	1.770.766.336	98	1,241,075,400	1,223,397,993	98,57

F. Capaian Target Restra

Tabel 11
Capaian Target Renstra

Sasaran Strategis			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Uraian	Indikator Kinerja	Target 2020	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase partisipasi masyarakat Dalam menggunakan hak pilih	75 %	-	80.09%	-	-
Meningkatnya toleransi di Kalangan Masyarakat	Persentase potensi konflik agar btidak terjadi konflik	100 %	15%	15%	23%	15%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. Nilai evaluasi akip 2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 3. Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	25%	25%	25%	25%



G. RENCANA AKSI TAHUN 2020

Tabel 12
Rencana Aksi Kantor Kesbangpol Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian Yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target	RENCANA (%)				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	RENCANA (%)				
					TW.1	TW.2	TW.3	TW.4				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Program pembinaan dan pendidikan politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75%	-	75%	-	-	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah kegiatan	2 Keg	-	1	1	-	Kasi Sosial Politik
									Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Bimtek	1 Keg	-	-	-	1	Kasi Sosial Politik
									Fasilitasi Tim/Verifikasi Peneliti	Jumlah Pertemuan	2 Keg	1	1	-	-	Kasi Sosial Politik



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020

								Pemeriksa Bantuan Kepada Partai Politik							
								Pembinaan/Sosialisasi Organisasi Masyarakat	Jumlah Orang	2 Keg	-	1	1	-	Kasi Sosial Politik
								Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Pertemuan	12 Kali	3	3	3	3	Kasi Sosial Politik
								Fasilitasi Pendaftaran, Pendataan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Organisasi Masyarakat	Monitoring	12 Kali	3	3	3	3	Kasi Sosial Politik
								Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyebarluasan Informasi Tentang P4GN Kepada Aparatur Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Pertemuan	4 Kali	1	1	1	1	Kasi Sosial Politik
								Pelatihan, Pemetaan dan Penguatan	Jumlah Kegiatan	1 Kali	-	1	-	-	Kasi Sosial Politik



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020

								Kapasitas Satgas dan Relawan Anti Narkoba pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah							
Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat		Persentase Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100%	15%	15%	23%	15%	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Kegiatan	2 Kali	-	1	-	1	Kasi Kesatuan Bangsa
								Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah kegiatan	2 kali	-	1	-	1	Kasi Kesatuan Bangsa
								Fasilitasi Kominda	Jumlah pertemuan	12 kali	3	3	3	3	Kasi Kesatuan Bangsa
								Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah Kegiatan	2 kali	-	1	-	-	Kasi Kesatuan Bangsa
								Pelatihan Bela Negara	Jumlah peserta	1					Kasi Kesatuan Bangsa
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur	1. Nilai evaluasi AKIP 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti						1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. Peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor 4. Peningkatan disiplin							



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020

									dan kinerja aparat							
									5. Peningkatan dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja.							
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai survei Kepuasan masyarakat (SKM)						1. Peningkatan pelayanan prima 2. Pengembangan data/informasi							



Adapun pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak telah melakukan Evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi yang telah ditetapkan secara Triwulan, hasil evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi akan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, selain itu Hasil Evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana aksi telah dimanfaatkan sebagai pemberian *reward* dan *punishment* sebagai tindak lanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata (data terlampir). Hasil capaian kinerja atas Rencana Aksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini :





Tabel 13
Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM								BIDANG/BAGIAN YANG MENANGANI BERDASARKAN STRUKTUR OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARARAN	REALISASI	
Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih	75%	478.650.000	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah	0	0	Kasi Sosial Politik
						Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik		0	0	Kasi Sosial Politik
						Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Keuangan Partai Politik		0	0	Kasi Sosial Politik
						Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Fasilitasi Koordinasi Pimpinan		463.800.000	463.079.100	Kasi Sosial Politik
						Fasilitasi Pendaftaran, Pendataan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)		0	0	Kasi Sosial Politik
						Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyebarluasan Informasi Tentang P4GN Kepada Aparatur Pemerintah Kota Pontianak				
						Pelatihan, Pemetaan dan Penguatan Kapasitas Satgas dan Relawan Anti Narkoba pada Perangkat Daerah di		0	0	Kasi Sosial Politik



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020

						Lingkungan Pemerintah Daerah				
	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100%	296.200.000	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Masyarakat		0	0	Kasi Kesatuan Bangsa
						Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0	0	Kasi Kesatuan Bangsa
						Fasilitasi KOMINDA		130.875.000	130.700.000	Kasi Kesatuan Bangsa
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		0	0	Kasi Kesatuan Bangsa
						Pelatihan Bela Negara		165.325.000	163.074.600	Kasi Kesatuan Bangsa
	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti			Pelayanan Administrasi Perkantoran		466.225.400	438.994.293	
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)							

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Secara Umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (Dua) sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik yang ditetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, relisasinya adalah sebagai berikut :

Sebanyak 2 (Dua) sasaran telah mencapai target yang ditetapkan yaitu :

1. Sasaran strategis " Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak", dengan indikator Sasaran Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih menunjukkan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian %..
2. Sasaran strategis "Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat ", dengan indikator sasaran Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat capaian yaitu sebesar 100 % pada tahun 2020 meskipun pada tahun 2020 banyak potensi konflik dan kejadian unjuk rasa.
3. Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2020, proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik sehingga Sisa Lebih Pagu Anggaran (SILPA) menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. SARAN

Langkah kedepan sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah:

1. Sistem AKIP pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP kantor Kesbangpol belum dapat tersajikan dengan optimal dikarenakan sulitnya mencari data yang dihasilkan dari masing – masing bidang teknis pada Kantor Kesbangpol dimana data tersebut tidak diperbaharui secara terperinci dan jelas.



2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang diharapkan masyarakat.

Pontianak, Januari 2021
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
KOTA PONTIANAK,

RIZAL, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690510 199010 1 001



**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2019 -2023**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Pontianak yang kondusif, demokratis dan partisipatif

Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan untuk Mendukung Stabilitas Politik Daerah yang Kondusif.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Total Pencapaian Target Kinerja per tahun					Kegiatan			Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur	1. Nilai Evaluasi AKIP. 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.	90%	90%	90%	90%	90%	Penerapan dan sistem prosedur pertanggung-jawaban yang jelas, teratur dan efektif.	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/-Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
									2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor 4. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kinerja Aparatur 5. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja - Penyusunan Rencana Kerja	
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	70%	80%	85%	90%	95%	1. Menerbitkan standar operasional prosedur 2. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.	1. Peningkatan Pelayanan Prima 2. Pengembangan Data/informasi	- Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penyusunan Data dan Profil OPD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Total Pencapaian Target Kinerja per tahun					Kegiatan			Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program	Kegiatan	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak pilih.	72,5	75 %	75%	75%	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pembinaan politik kepada masyarakat 2. Menyelenggarakan pembinaan/sosialisasi terhadap Ormas dan LSM. 3. Memverifikasi kelengkapan berkas bantuan keuangan kepada partai politik. 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik. 5. Melaksanakan kehidupan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan 6. Sosialisasi bahaya Narkoba dan P4GN 	Pembinaan dan Pendidikan politik kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Siormas - Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Kepada Partai Politik - Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik - Fasilitasi FKUB - Pembinaan/Sosialisasi Ormas - Fasilitasi Forkopimda 	Seksi Sosial politik
		Persentase penanganan potensi konflik agar tidak terjadi konflik.	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fasilitasi pembauran kebangsaan berupa dialog kerukunan antar etnis. 2. Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan dini guna mendeteksi konflik sosial. 3. Melaksanakan sosialisasi tentang pengembangan wawasan kebangsaan. 4. Melaksanakan koordinasi dengan intelijen Kota Pontianak. 5. Melaksanakan pelatihan bela negara. 	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) - Fasilitasi KOMINDA - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara - Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)/Pelatihan Bela Negara 	Seksi Kesatuan Bangsa

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH**

Instansi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcomes)	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	6	7	8	9	12
1. Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak	75 %	Program Pembinaan Sosial Politik	1. Fasilitasi Tim Verifikasi Penelitian Pemeriksaan Bantuan Kepada Partai Politik	Terlaksananya Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan kepada Partai Politik	12 parpol	14.850.000,-
				2. Fasilitasi FKUB	Terlaksananya kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan	300 org	0
				3. Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Tersedianya laporan keuangan Bantuan Partai Politik yang tepat, akurat dan dapat	48 org	0
				4. Fasilitasi Forkopimda	Meningkatnya koordinasi, Komunikasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat	12 kali	463.800.000
				5. Pembinaan/Sosialisasi Ormas	Terselenggaranya pembinaan LSM/Ormas	300	0
				6. Fasilitasi Siormas	Meningkatnya tertib organisasi kemasyarakatan	12	0
				7. Sosialisasi bahaya narkoba dan P4GN	Pemahaman akan bahaya narkoba	400	0
				Jumlah			478.650.000
2. Meningkatnya Keharmonisan dan Kesadaran Dalam Keberagaman	Persentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100 %	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Terlaksananya Pembinaan Mental Bela Negara	400 org	0
				2. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Dialog Forum Pembauran Kebangsaan	300 org	0
				3. Fasilitas Kominda	Terselenggaranya antisipasi dan cegah dini potensi konflik	12 Kali	130.875.000,-
				4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan Dini kepada Masy.	200 org	0
				5. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara	90 org	142.893.600,-
				6. Pelatihan Bela Negara	Terbentuknya kader wawasan kebangsaan	60	165.325.000,-
							296.200.000
J U M L A H							774.850.000,-

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Patisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75 %
2	Meningkatnya toleransi di Kalangan masyarakat	Persentase Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pembinaan Sosial Politik	Rp. 478.650.000,-	APBD KOTA PONTIANAK
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 296.200.000,-	APBD KOTA PONTIANAK

Pontianak, Oktober 2020

WALIKOTA PONTIANAK,



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK,



RIZAL, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19690510 199010 1 001

